

ANALISIS PENGARUH DAK DAN PAD TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BALI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI PEMODERASI

I Putu Ari Suyasa¹ Ica Rika Candraningrat²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
E-mail: suyasa.2207521120@student.unud.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota serta Provinsi di Bali mengalami fluktuasi yang signifikan pada periode 2020-2023 akibat dampak pandemi COVID-19 dan ketergantungan sektor pariwisata. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta belanja modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh DAK dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi serta menguji peran belanja modal sebagai pemoderasi pada Kabupaten/Kota serta Provinsi di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi moderasi. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali periode 2020-2023, dengan jumlah observasi sebanyak 40 data. Analisis dilakukan menggunakan IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan DAK dan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal juga tidak mampu memoderasikannya. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori desentralisasi fiskal dengan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kapasitas fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah disarankan meningkatkan efektivitas pengelolaan DAK, PAD, serta belanja modal dengan lebih memfokuskan pada sektor produktif yang mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kata kunci: belanja modal; dana alokasi khusus; pendapatan asli daerah; pertumbuhan ekonomi.

ABSTRACT

Economic growth in Bali experienced fluctuations during the 2020-2023 period due to COVID-19 pandemic and the region's dependence on tourism. This condition highlights the importance of effective regional financial management through the Special Allocation Fund, Regional Original Revenue, and capital expenditure in supporting economic growth. This study aims to analyze the influence of DAK and PAD on economic growth and examine the role of capital expenditure as a moderating variable. The research used a quantitative approach with Moderated Regression Analysis. Secondary data were obtained from local governments financial reports and the Central Statistics Agency of Bali Province for the 2020-2023 period, with 40 observations. Data analysis was conducted using IBM SPSS. The results indicate that DAK and PAD do not have a significant effect on economic growth, and capital expenditure is also unable to moderate the relationship. This study contributes to the development of fiscal decentralization theory by demonstrating a mismatch between regional fiscal capacity and economic growth. Regional governments are recommended to improve the effectiveness of managing DAK, PAD, and capital expenditure by focusing more on productive sectors that can provide a direct impact on economic growth.

Keywords: capital expenditure; economic growth; regional original revenue; special allocation fund.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan pendapatan riil per kapita masyarakat di satu wilayah yang terjadi dalam jangka panjang dan disertai dengan terjadinya perbaikan sistem kelembagaan sebagai hasil dari proses perubahan yang berlangsung secara berkelanjutan (Mihadi Putra & Ahmad, 2024). Tingkat pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah di Bali mempunyai karakteristik yang unik karena ketergantungannya yang tinggi terhadap sektor pariwisata. Dinamika pertumbuhan ekonomi Bali dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan (Pradana, 2022). Berlandaskan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2025), tingkat pertumbuhan ekonomi Bali saat 2020-2023 merasakan fluktuasi yang sangat nyata. Pertumbuhan ekonomi di Bali saat 2020 dan 2021 ada penyusutan dalam skala cukup besar yakni sejumlah -9,34 persen dan -2,46 persen akibat ketergantungan daerah di Bali seperti Badung dan Denpasar terhadap sektor pariwisata yang mengalami tekanan berat oleh pandemi COVID-19.

Tabel 1.
Presentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota serta
Provinsi di Bali 2020-2023

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	-4,98	-0,65	2,98	3,66
Kab. Tabanan	-6,17	-1,98	2,93	3,56
Kab. Badung	-16,55	-6,74	9,97	11,29
Kab. Gianyar	-8,39	-1,05	4,04	5,06
Kab. Klungkung	-6,38	-0,23	3,12	4,7
Kab. Bangli	-4,1	-0,33	2,8	3,5
Kab. Karangasem	-4,49	-0,56	2,58	3,1
Kab. Buleleng	-5,8	-1,27	3,11	3,64
Kota Denpasar	-9,44	-0,92	5,02	5,69
Provinsi Bali	-9,34	-2,46	4,84	5,71

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, tahun 2020 merupakan tahun terberat bagi keseluruhan kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, utamanya bagi Kabupaten Badung dengan perubahan sangat tajam yakni hampir menyentuh angka -16 persen. Tahun 2021, beberapa kabupaten/kota di Provinsi Bali mulai terdapat perubahan yang signifikan walaupun pertumbuhannya masih terbatas. Perubahan ini ditunjang oleh aktivitas ekonomi lokal dan bantuan dari pemerintah. Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali mulai bergerak perlahan menuju kondisi yang lebih baik Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali mulai memperlihatkan kestabilan di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Bali, pertumbuhan yang tinggi ditunjukkan oleh Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

Menurut teori desentralisasi fiskal dalam buku desentralisasi fiskal yang ditulis oleh Puspita (2021) dan penelitian Marya & Handra (2024), memberi keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu mengontrol keuangan daerahnya secara efektif dan

efisien dengan tujuan untuk menyediakan pelayanan publik yang baik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Dalam konteks studi ini menurut teori desentralisasi fiskal, DAK dan PAD memiliki peran yang sangat penting. DAK berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal pusat untuk mendukung pembangunan daerah berskala prioritas nasional, dan PAD menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam membayarkan kegiatan daerahnya. Maka itu dengan bertambahnya nilai DAK dan PAD maka tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkat juga karena saling berkaitan erat.

DAK sebagai suatu instrumen transfer fiskal dari pusat ke daerah dengan tujuan untuk mendukung membayarkan aktivitas tertentu yang ialah urusan daerah dan mengikuti prioritas nasional, alhasil dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Pambudi, 2021). Berdasarkan teori Desentralisasi Fiskal menurut buku Puspita (2021) tentang desentralisasi fiskal, DAK sebagai salah satu komponen transfer fiskal dari pusat ke daerah, maka itu DAK bisa dihitung berdasarkan besaran dana transfer dari pusat ke daerah yang dibagikan melalui APBN. Dalam konteks Provinsi Bali, DAK memiliki peranan vital dalam pemulihan ekonomi daerah pada saat pandemi COVID-19 karena Provinsi Bali sangat tergantung pada sektor pariwisata yang sempat menurun drastis akibat pandemi. Peningkatan efektivitas penyaluran dan pemanfaatan DAK ini dapat mendukung mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Keberadaan DAK di tingkat daerah tentunya dapat mendukung pembiayaan implementasi aktivitas tertentu sebagai bagian dari prioritas nasional yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pambudi, 2021). Menurut Maula (2023) pada artikel studinya, DAK bisa dihitung dengan nilai besaran DAK.

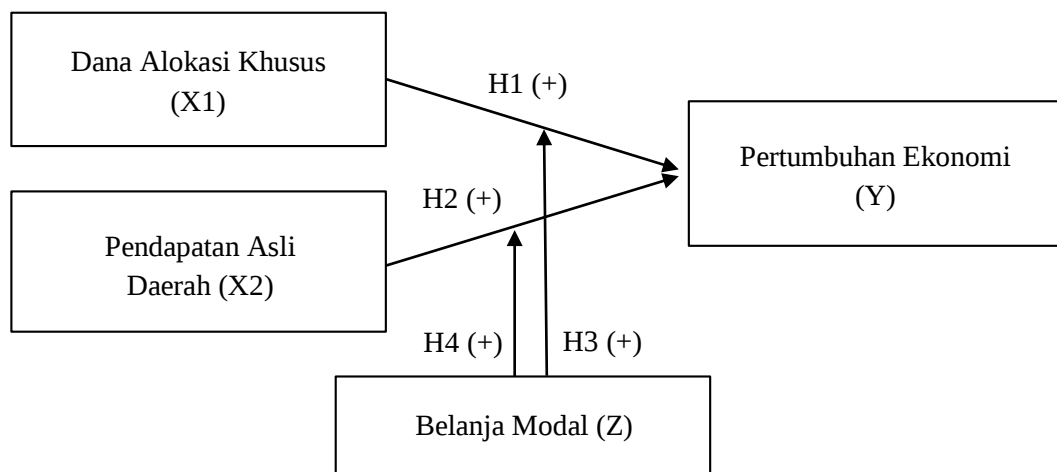
PAD yaitu suatu pilar mandiri suatu daerah yang berasal dari aktivitas ekonomi daerah itu sendiri, hingga mencapai peningkatan PAD yang tentunya dapat diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi (Putri & Darmayanti, 2019). Pendapatan pengelolaan aset daerah, pajak daerah, dan bentuk-bentuk PAD daerah yang sah lainnya merupakan sumber PAD. PAD di Provinsi Bali didominasi oleh sektor pariwisata, perdagangan serta jasa, sebagian besar pendapatan daerah Bali sumbernya melalui pajak hotel, pajak restoran, dan serta pajak hiburan (Kanaiya, 2020). Belanja Modal mempunyai hubungan yang erat dengan investasi di sektor vital berskala nasional seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Belanja modal yang dialokasikan dengan tepat memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Yudiasuti, 2025). Menurut Antari (2018), pengeluaran modal adalah jenis investasi pemerintah yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah. Untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, perlu untuk menciptakan aset tetap seperti fasilitas, infrastruktur, dan sarana untuk menyediakan layanan publik yang memadai. Peningkatan belanja modal akan memengaruhi kenaikan produktivitas masyarakat, dan peningkatan investor yang berinvestasi akan memengaruhi peningkatan PAD. Makin besar pemasukan suatu daerah, berarti makin menaik pula belanja modal dari pemerintah daerah (Solikah, 2024). Pengalokasian DAK memengaruhi pada belanja modal karena pada dasarnya DAK dapat meningkatkan aset tetap pemerintah yang selanjutnya mendukung pelayanan kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi (Faisal, 2024). Penelitian terdahulu tentang pengaruh DAK dan PAD kepada

pertumbuhan ekonomi menciptakan keberagaman temuan, seperti memengaruhi positif dan memengaruhi negatif. Menurut teori desentralisasi fiskal dalam buku desentralisasi fiskal yang ditulis oleh Puspita (2021) dan penelitian Marya & Handra (2024), alokasi belanja modal yang baik dapat memperkuat pengaruh DAK dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini menghasilkan temuan baru dengan belanja modal sebagai variabel moderasi, sehingga tidak hanya melihat pengaruh langsung DAK dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menguji pengaruh belanja modal dalam hubungan antar variabel tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan rentang waktu 2020–2023, sehingga menggambarkan kondisi ekonomi daerah pada masa pandemi COVID-19 dan masa pemulihan ekonomi setelah dilanda pandemi COVID-19.

METODE PENELITIAN

DAK merupakan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta Provinsi di Bali untuk membayarkan kebutuhan khusus, terutama yang terkait dengan prioritas nasional seperti infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan yang bisa berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi serta PAD yang merupakan pendapatan pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta Provinsi di Bali yang sumbernya melalui daerah itu sendiri, seperti pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah, yang dipergunakan untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali diindikasikan berpengaruh terhadap peningkatan PDRB, utamanya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan yang didapat masyarakat, atau dikenal pula dengan sebutan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh tersebut dimoderasi oleh belanja modal sebagai pengeluaran daerah Kabupaten/Kota serta Provinsi di Bali yang ditujukannya untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan yang memengaruhi kenaikan produktivitas perekonomian dan sarana prasarana umum Provinsi Bali. Secara konseptual, definisi operasional tersebut dapat divisualisasikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah, 2025

Berlandaskan kerangka konseptual pada Gambar 1, dapat diketahui bahwa DAK dan PAD dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, selanjutnya belanja modal memoderasi pengaruhnya dari DAK dan PAD kepada pertumbuhan ekonomi.

Pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan kepada pertumbuhan ekonomi, perihal ini ditunjang oleh studi yang diteliti oleh Prismadani (2021), Sisilia & Harsono (2021), Rumere & Suruan (2021), Sucipto (2022), Bustani (2022), Pambudi (2021), Trianto & Panggabean (2023), dan Abdi (2025). Namun, beberapa penelitian lain seperti yang diteliti oleh Rahman (2021), Perkasa (2021) dan Caturingsih (2021) yang menemukan bahwa DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan karakteristik masing-masing daerah, efektivitas pengelolaan DAK, serta kondisi ekonomi khususnya pada daerah yang terdampak pandemi COVID-19 seperti Bali.

H1: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan kepada pertumbuhan ekonomi, perihal ini ditunjang oleh studi yang diteliti oleh Novia (2023), Rahman (2021), Sisilia & Harsono (2021), Istiqamah (2022), Firmansyah (2022), Widyasari (2022), Febrianti & Sari (2023), Putra & Ahmad (2024) dan Vianney (2024). Namun, beberapa penelitian lain seperti yang diteliti oleh Pradana (2022), Wau & Mendrofa (2022) dan Fakhruddin (2024) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hasil penelitian ini kemungkinan dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola sumber PAD, serta kondisi ekonomi khususnya pada daerah yang terdampak pandemi COVID-19 seperti Bali.

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan studi yang diteliti oleh Yudiastuti (2025), dan Pinem (2020) menyebutkan belanja modal sebagai pemoderasi bisa menguatkan pengaruhnya DAK dan PAD kepada pertumbuhan ekonomi. Studi yang diteliti oleh Novia (2023), dan Widyasari (2022), ditemukan bahwa belanja modal memengaruhi positif signifikan kepada pertumbuhan ekonomi. Penelitian serupa menurut Marheni & Triyanto (2023) menyebutkan belanja modal memengaruhi positif signifikan kepada DAK dan PAD. Namun, penelitian lain seperti yang diteliti oleh Prismadani (2021) menunjukkan bahwa belanja modal tidak mampu memoderasi pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hasil penelitian ini kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan efektivitas alokasi belanja modal, prioritas pembangunan daerah serta kondisi ekonomi khususnya pada daerah yang terdampak pandemi COVID-19 seperti Bali.

H3: Belanja Modal memperkuat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan studi yang diteliti oleh Yudiastuti (2025) dan Pinem (2020) menyebutkan belanja modal sebagai pemoderasi bisa menguatkan pengaruhnya DAK dan PAD kepada pertumbuhan ekonomi. Studi yang diteliti oleh Novia (2023), dan Widyasari (2022), ditemukan bahwa belanja modal memengaruhi positif signifikan kepada pertumbuhan ekonomi. Penelitian serupa menurut

Pambudi (2021) menyebutkan belanja modal memengaruhi positif bersignifikan kepada DAK dan PAD. Namun, beberapa penelitian lain seperti yang diteliti oleh Noeng & Ardini (2023) dan Prismadani (2021) yang menyatakan belanja modal tidak mampu memoderasi pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hasil ini kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan kualitas pengelolaan anggaran daerah, efektivitas pembangunan infrastruktur serta karakteristik ekonomi masing-masing daerah.

H4: Belanja Modal memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian dilaksanakan tujuannya menganalisis pengaruh DAK dan PAD kepada pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali dengan Belanja Modal sebagai pemoderasi. Penelitian ini mempergunakan konsep kuantitatif kausalitas dan analisis data sekunder, tujuannya untuk mengkaji hubungan kausalitas antar variabel yang diteliti. Lokasi penelitian ini ialah di Provinsi Bali yang mencakup sembilan kabupaten/kota yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar. Objek penelitiannya yaitu pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh DAK dan PAD dan belanja modal sebagai pemoderasi di Provinsi Bali pada tahun 2020-2023.

Populasi di dalam penelitian ini ialah Kabupaten/Kota serta Provinsi di Bali sepanjang 2020-2023. Sampel di dalam penelitian ini yaitu semua bagian populasi (sampel jenuh), yakni Kabupaten/Kota serta Provinsi Bali sepanjang 2020-2023, dan unit analisis dipenelitian ini yaitu laporan keuangan di Kabupaten/Kota serta Provinsi Bali selama tahun 2020-2023. Jumlah pengamatan pada penelitian kali ini ialah sejumlah 40 observasi, yang mencakup data laporan pertumbuhan ekonomi di Bali periode 2020-2023, dan laporan pertumbuhan sembilan kabupaten/kota di Bali sepanjang 2020-2023. Teknik penentuan sampel yang dipergunakan dipenelitian ini yaitu sensus. Data yang dipergunakan yaitu data sekunder bersifat kuantitatif, didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan laporan keuangan setiap daerah. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi yang memanfaatkan instrumen berupa dokumen dan laporan resmi. Data dianalisis secara deskriptif dan regresi moderasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rata-rata, deviasi standar, varians, total, rentang, kurtosis, dan kemiringan (kemiringan distribusi) adalah komponen yang membentuk analisis statistik deskriptif dari setiap variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi, DAK, PAD, dan belanja modal. Ringkasan hasil analisis tersebut ditampilkan dalam Tabel 2.

Pada hasil uji statistik deskriptif di Tabel 2, variabel pertumbuhan ekonomi mencerminkan fluktuasi cukup tinggi selama tahun penelitian. Hal itu terlihat pada nilai minimum pertumbuhan ekonomi senilai -16,55 persen dan maksimum sebesar 11,29 persen, pada rata-rata senilai -0,0133. Nilai rata-rata negatif mengindikasikan pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut mengalami tekanan ataupun kontraksi, yang bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi. Selain itu, standar deviasinya senilai 5,71034 menggambarkan variasi data yang cukup besar sehingga pertumbuhan ekonomi antar daerah atau waktu pengamatan relatif tidak merata.

Tabel 2.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	40	-16,55	11,29	-0,0133	5,71034
LN_DAK	40	25,32	27,93	26,1520	0,57478
LN_PAD	40	25,37	29,40	27,0091	1,08357
LN_BM	40	24,77	28,00	26,0738	0,78721
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data diolah, 2026

Variabel DAK yang telah ditransformasi dalam bentuk logaritma (LN_DAK) mempunyai rata-rata senilai 26,1520 dengan standar deviasinya yang relatif kecil yaitu 0,57478. Hal tersebut menggambarkan distribusi data DAK cenderung stabil dan tidak adanya fluktuasi yang besar antar sampel. Begitu pula dengan variabel PAD (LN_PAD) yang mempunyai rata-rata senilai 27,0091 dan standar deviasinya 1,08357, menggambarkan adanya variasi data yang sedikit lebih tinggi dibandingkan DAK, namun masih tergolong terkendali. Variabel belanja modal (LN_BM) mempunyai rata-rata senilai 26,0738 dan standar deviasinya 0,78721, juga menggambarkan sebaran data yang tidak terlalu besar.

Secara keseluruhan, DAK, PAD, dan belanja modal mempunyai distribusi data yang relatif stabil dengan tingkat variasi yang rendah. Adapun pertumbuhan ekonomi memiliki fluktuasi yang lebih tinggi, sehingga mengindikasikan adanya faktor lain yang dapat memengaruhinya, meskipun alokasi dan pengelolaan keuangan daerah relatif konsisten.

Tabel 3.
Hasil Uji Analisis Regresi Dasar dan Moderasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Dasar					
(Constant)	-36,777	42,178		-0,872	0,389
LN_X1	0,909	1,966	0,091	0,462	0,647
LN_X2	0,481	1,043	0,091	0,461	0,647
Moderasi					
(Constant)	-12,815	65,451		-0,196	0,846
LN_X1	75,470	39,293	7,597	1,921	0,063
LN_X2	-73,388	36,592	-13,926	-2,006	0,053
LN_X1Z	-2,833	1,467	-16,323	-1,931	0,062
LN_X2Z	2,772	1,390	22,949	1,994	0,054

Sumber: Data diolah, 2026

Pada hasil uji regresi dasar di Tabel 3, nilai konstanta β_0 sebesar -36,777. Nilai tersebut menampilkan jika nilai X1 dan X2 bernilai tetap maka nilai konstanta Y senilai -36,777. Koefisien regresi β_1 senilai 0,909 menunjukkan jika X1 bertambah, maka Y akan mengalami peningkatan senilai 0.909 pada asumsi konstanta nilai X2 tetap. Begitu pula dengan koefisien regresi β_2 senilai 0,481 perihal ini menunjukkan jika X2 bertambah, maka Y akan mengalami peningkatan

senilai 0.481 pada asumsi konstanta nilai X1 tetap.

Pada hasil uji regresi moderasi di Tabel 3, dapat ditunjukkan nilai konstanta β_0 senilai -12,815. Perihal ini menampilkan jika nilai X1, X2, X1Z, X2Z bernilai tetap maka nilai konstanta Y senilai -12,815. Koefisien regresi β_1 senilai 75,470 perihal ini menunjukkan jika X1 bertambah, maka Y akan mengalami peningkatan senilai 75,740. Koefisien regresi β_2 senilai -73,388, perihal ini menunjukkan jika X2 bertambah, maka Y akan mengalami penurunan senilai -73,388. Koefisien regresi β_3 senilai -2,833, sehingga jika X1Z bertambah, maka Y akan mengalami penurunan senilai -2.833. Koefisien regresi β_4 senilai 2,772. Hal tersebut memperlihatkan jika X2Z bertambah, maka Y akan mengalami peningkatan senilai 2.772.

Tabel 4.
Hasil Analisis Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnof
dengan Metode Monte Carlo

Keterangan			Unstandardized Residual
N			40
Asymp. Sig. (2-tailed)			.029 ^c
Sig.			.316 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	99%	Lower Bound	.304
	Confidence Interval	Upper Bound	.328

Sumber: Data diolah, 2026

Pada Tabel 4, menampilkan besarnya angka Monte Carlo Sig. Sejumlah 0,316. Nilai ini melampaui tingkat signifikansi 0,05 yang artinya data yang dipergunakan studi ini berdistribusi normal, alhasil dapat disimpulkan asumsi normalitas pada pemodelan regresi dapat terpenuhi.

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
LN_X1	0,534	1,873
LN_X2	0,397	2,517
LN_Z	0,319	3,134

Sumber: Data diolah, 2026

Pada hasil uji multikolinearitas di Tabel 5, ditunjukkan bahwa angka toleransi pada seluruh variabel independen melampaui 0,10 yang mencerminkan tidak mengindikasikan adanya multikolinearitas antar variabel independen pada pemodelan regresi. Angka VIF pada Tabel 5 juga menunjukkan besaran yang lebih kecil dari 10, yang mencerminkan tidak mengindikasikan adanya multikolinearitas antar variabel independen pada pemodelan regresi

Tabel 6.
Hasil Analisis Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.246 ^a	0,061	-0,018	5,76081	1,981

Sumber: Data diolah, 2026

Pada Tabel 6, didapat besaran durbin-watson sejumlah 1,981, besaran ini terletak pada rentang 1,5 hingga 2,5, alhasil berkesimpulan model regresi tidak mengindikasikan adanya autokorelasi.

Tabel 7.
Hasil Analisis Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-4,946	15,707		-0,315	0,755
LN_X1	-0,736	0,816	-0,189	-0,901	0,373
LN_X2	0,984	0,502	0,476	1,961	0,058
LN_Z	-0,004	0,771	-0,002	-0,006	0,996

Sumber: Data diolah, 2026

Pada Tabel 7, ditunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai melampaui 0,05. Perihal ini menampilkan model regresi tidak mengindikasikan adanya asumsi heteroskedastisitas.

Peneliti kemudian membuat pengujian hasil hipotesis. Berdasarkan hasil analisis regresi dasar dengan uji t (Parsial) yang telah dicantumkan pada Tabel 3, diketahui t hitung data DAK lebih kecil dibandingkan t tabel ($0,462 < 2,026$) serta angka sig. $0,647 > 0,05$. Maknanya tidak ditemukan pengaruh bersignifikan antara DAK kepada pertumbuhan ekonomi. Nilai t hitung data PAD lebih kecil dibandingkan t tabel ($0,461 < 2,026$) serta angka sig. $0,647 > 0,05$. Maknanya tidak ditemukan pengaruh bersignifikan antara PAD kepada pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis regresi moderasi dengan uji t (Parsial) pada Tabel 3 juga memperlihatkan DAK mempunyai t hitung lebih kecil dibandingkan t tabel ($1,921 < 2,030$) serta angka sig. $0,063 > 0,05$. Maknanya tidak ditemukan pengaruh bersignifikan antara DAK kepada pertumbuhan ekonomi, maka H1 ditolak. Hasil serupa juga ditemukan pada analisis data PAD yang memiliki t hitung lebih kecil dibandingkan t tabel ($-2,006 < 2,030$) serta angka sig. $0,053 > 0,05$. Maknanya tidak ditemukan pengaruh bersignifikan antara PAD kepada pertumbuhan ekonomi, maka H2 ditolak.

Belanja Modal sebagai pemoderasi DAK memiliki nilai t hitung lebih kecil dibandingkan t tabel ($-1,931 < 2,030$) serta angka sig. $0,062 > 0,05$. Maknanya belanja modal tidak memoderasi pengaruhnya DAK kepada pertumbuhan ekonomi, maka H3 ditolak. Hasil serupa juga ditemukan pada analisis belanja modal sebagai variabel yang dapat memoderasi PAD dengan nilai t hitung lebih kecil dibandingkan t tabel ($1,994 < 2,030$) serta angka sig. $0,054 > 0,05$. Maknanya belanja modal tidak memoderasi pengaruhnya PAD kepada pertumbuhan

ekonomi, maka H4 ditolak.

Tabel 8.
Hasil Uji F Analisis Regresi

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Dasar					
Regression	33,418	2	16,709	0,499	.611 ^b
Residual	1238,295	37	33,467		
Total	1271,713	39			
Moderasi					
Regression	196,017	4	49,004	1,594	.198 ^b
Residual	1075,697	35	30,734		
Total	1271,713	39			

Sumber: Data diolah, 2026

Analisis regresi dasar dilakukan dengan uji F (simultan). Hasil uji F pada Tabel 8 memperlihatkan nilai F hitung lebih kecil dibandingkan nilai F tabel yaitu ($0,499 < 3,25$). Alhasil dapat diartikan bahwa tidak ditemukan pengaruh bersignifikan antara DAK dan PAD kepada pertumbuhan ekonomi. Begitu pula pada analisis regresi moderasi juga dilakukan dengan uji F (simultan). Hasil yang didapatkan yakni nilai F hitung lebih kecil dibandingkan nilai F tabel ($1,594 < 2,64$) serta angka sig. $0,198 > 0,05$. Alhasil diartikan bahwa tidak ditemukan pengaruh bersignifikan antara DAK dan PAD kepada pertumbuhan ekonomi, serta belanja modal tidak memoderasi pengaruhnya DAK dan PAD kepada pertumbuhan ekonomi.

Tabel 9.
Hasil Uji Koefisien Determinasi Analisis Regresi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Dasar				
1	.162 ^a	0,026	-0,026	5,78511
Moderasi				
1	.393 ^a	0,154	0,057	5,54384

Sumber: Data diolah, 2026

Pada hasil uji koefisien determinasi pada analisis regresi dasar, didapat nilai R Square senilai 0,026 atau $0,026 \times 100$ persen = 2,6 persen. Maknanya pengaruh variabel bebas yaitu DAK dan PAD kepada variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi ialah sejumlah 2,6 persen, dan selebihnya yaitu 97,4 persen dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi pada analisis regresi moderasi didapatkan nilai R Square senilai 0,154 atau $0,154 \times 100$ persen = 15,4 persen. Maka, pengaruh variabel bebas yaitu DAK dan PAD, serta Belanja Modal sebagai pemoderasi pengaruh DAK dan PAD terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi adalah senilai 15,4 persen, dan selebihnya yaitu 84,6 persen dipengaruhi oleh faktor lain.

Berlandaskan hasil pengujian hipotesis, DAK tidak memengaruhi signifikan kepada pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menggambarkan selama tahun 2020-

2023 di Kabupaten/Kota dan Provinsi di Bali, peningkatan DAK tidak serta-merta sejalan oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian ini bertentangan dengan teori desentralisasi fiskal dalam buku desentralisasi fiskal yang ditulis oleh (Puspita, 2021) karena peran DAK belum signifikan dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kondisi ekonomi selama tahun 2020-2023 yang mengalami fluktuasi tajam akibat pandemi COVID-19 sehingga alokasi DAK lebih difokuskan di program pemulihan ekonomi, khususnya di bidang kesehatan dan bantuan sosial. Selain itu, DAK digunakan sesuai dengan ketentuan spesifik yang ditetapkan oleh pusat, alhasil pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas pengalokasiannya dan menyebabkan DAK belum bisa dipergunakan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini selaras terhadap temuan Perkasa (2021), Caturningsih (2021), dan Rahman (2021) yang menyimpulkan jika DAK tidak memengaruhi signifikan kepada pertumbuhan ekonomi.

Berlandaskan hasil pengujian hipotesis, PAD tidak memengaruhi signifikan kepada pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menggambarkan selama tahun 2020-2023 di Kabupaten/Kota serta Provinsi di Bali, peningkatan PAD tidak secara otomatis diikuti oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak sejalan dengan teori desentralisasi fiskal dalam buku desentralisasi fiskal yang ditulis oleh (Puspita, 2021) karena peran PAD belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Tidak signifikannya pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi diduga disebabkan oleh kondisi ekonomi sepanjang 2020-2023 merasakan fluktuasi tajam akibat pandemi COVID-19, yang berimplikasi besar pada perekonomian Bali yang tergantung pada sektor pariwisata dan penggunaan PAD yang masih didominasi untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah, termasuk belanja pegawai dan administrasi (Fakhruddin, 2024). Hasil penelitian ini selaras terhadap temuan Wau & Mendrofa (2022), dan Pradana (2022), yang sama-sama menyimpulkan jika PAD tidak memengaruhi signifikan kepada pertumbuhan ekonomi.

Berlandaskan hasil pengujian hipotesis, belanja modal tidak mampu memoderasi pengaruhnya DAK kepada pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menggambarkan bahwa interaksi antara belanja modal dan DAK tetap tidak memberikan pengaruh signifikan kepada pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020-2023 di Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali. Secara teoritis, belanja modal seharusnya memperkuat efektivitas DAK (Kanaiya, 2020). Namun, dalam praktiknya, peran tersebut belum terlihat optimal. Selama periode pandemi COVID-19, terjadi penyesuaian kebijakan fiskal daerah melalui refocusing dan realokasi anggaran. Peralihan belanja dari investasi jangka panjang ke belanja penanganan kesehatan dan bantuan sosial menyebabkan alokasi belanja modal menjadi terbatas, sehingga tidak mampu memperkuat pengaruh DAK kepada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, efektivitas belanja modal tidak semata-mata dipengaruhi oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan pelaksanaannya. Dampak belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi umumnya memerlukan waktu (time lag) dan dipengaruhi oleh efisiensi proyek dan kapasitas pengelolaan anggaran. Hal ini menyebabkan kontribusi belanja modal dalam memperkuat hubungan DAK dan pertumbuhan ekonomi menjadi kurang terlihat dalam jangka pendek. Selain itu, penggunaan DAK yang ditentukan secara spesifik

oleh pusat juga membatasi fleksibilitas daerah dalam mengintegrasikan DAK dengan prioritas belanja modal. Akibatnya, sinergi antara kedua instrumen fiskal tersebut belum berjalan secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil studi ini selaras terhadap temuan Prismadani (2021), yang menyebutkan belanja modal tidak mampu memoderasi pengaruhnya DAK kepada pertumbuhan ekonomi.

Berlandaskan hasil pengujian hipotesis, belanja modal tidak mampu memoderasi pengaruhnya PAD kepada pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menggambarkan bahwa interaksi antara belanja modal dan PAD belum mampu memberikan pengaruh signifikan kepada pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020–2023 di Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali. Idealnya, peningkatan PAD akan memperkuat peran belanja modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena belanja modal memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang bisa mendorong aktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan kenaikan produktivitas faktor-faktor produksi (Kanaiya & Mustanda, 2020). Namun, hasil penelitian ini menggambarkan bahwa mekanisme tersebut tidak berjalan secara optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah melemahnya kapasitas fiskal daerah akibat penurunan PAD selama pandemi COVID-19, terutama di wilayah yang sangat tergantung pada sektor pariwisata, sehingga terjadi pergeseran prioritas anggaran ke arah pengeluaran belanja wajib dan penanganan dampak krisis. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan fiskal yang menyebabkan *crowding out* terhadap belanja produktif, sehingga alokasi belanja modal menjadi terbatas.

Kenaikan PAD tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas belanja (*spending quality*). Dalam praktiknya, PAD masih cenderung dipergunakan untuk membayarkan belanja operasional, alhasil tidak sepenuhnya diarahkan pada investasi yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi. Belanja modal memiliki karakteristik dampak yang tidak instan, dinamis, dan memerlukan waktu (*dynamic multiplier effect*). Dalam jangka pendek, terutama pada periode krisis, kontribusi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung tidak terlihat signifikan karena proyek-proyek investasi belum mencapai tahap yang memberikan output ekonomi secara langsung. Di sisi lain, belum optimalnya hubungan komplementer antara PAD dan belanja modal juga mengindikasikan adanya keterbatasan pemerintah daerah di dalam menyerap dan mengelola sumber daya fiskal secara efektif. Dengan demikian, ketidakmampuan belanja modal dalam memoderasi pengaruhnya PAD terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal saja tidak cukup, tanpa diiringi dengan perbaikan kualitas belanja, efisiensi pengelolaan anggaran, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah. Hasil penelitian ini selaras terhadap temuan Noeng & Ardini (2023) dan Prismadani (2021) yang sama-sama menyatakan bahwa belanja modal tidak mampu memoderasi pengaruhnya PAD kepada pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan hasil analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Selain itu, Belanja Modal tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan asli Daerah

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori desentralisasi fiskal dengan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kapasitas fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi. Dalam praktiknya, penelitian ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif. Limitasi penelitian ini terlihat pada kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen masih terbatas yang ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang rendah. Selain itu, periode penelitian ini relatif singkat, yaitu 2020-2023, sehingga belum sepenuhnya mampu menangkap pengaruh jangka panjang dari kebijakan fiskal daerah. Agenda penelitian mendatang diarahkan pada penambahan variabel yang merepresentasikan kualitas belanja dan kapasitas kelembagaan, serta mempergunakan periode yang lebih panjang

Saran bagi pemerintah daerah, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam mengoptimalkan PAD sebagai instrumen pembangunan dalam meningkatkan belanja produktif, khususnya belanja modal, serta mengurangi dominasi belanja operasional. Diversifikasi sumber PAD juga dapat dilakukan agar tidak bergantung pada satu sektor saja. Selain itu, fokus kebijakan harus bergeser ke peningkatan kualitas belanja melalui penganggaran berbasis kinerja, pemilihan program berdaya ungkit tinggi, serta penguatan perencanaan dan evaluasi agar berimplikasi nyata pada pertumbuhan ekonomi. Bagi pemerintah pusat, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan fleksibilitas dalam pengelolaan DAK agar lebih adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik daerah. Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah perlu diperkuat agar DAK dapat terintegrasi secara efektif dengan prioritas pembangunan daerah dan memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa memasukkan variabel yang merepresentasikan kualitas belanja dan kapasitas kelembagaan, menggunakan periode yang lebih panjang, serta mempertimbangkan model dinamis atau analisis komparatif untuk memperoleh hasil yang lebih kuat.

REFERENSI

- Abdi, M., Suharianto, J., Anggriani, D., & Sianturi, Y. M. (2025). Pengaruh DAK dan TPT Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan IPM di Sumatera Utara 2009-2024. *Ikraith-Ekonomika*, 8(3), 151–162.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2025). *Pertumbuhan PDRB/Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Persen)*, 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTExlZI=/pertumbuhan-pdrb-ekonomi-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html>
- Bustani, Khaddafi, M., & Nur Ilham, R. (2022). Regional Financial Management System of Regency/City Regional Original Income in Aceh Province Period Year 2016-2020. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 2(3), 459–468.

- <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v2i3.277>
- Caturningsih. (2021). Analisis Pengaruh PAD, DAK, dan DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, 2(1), 91–97.
- Faisal, Y. (2024). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 8(01), 402–412.
- Fakhruddin, I., Saputra, B. Y., & Firdaus. (2024). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis. *Scientific Journal Of Economics, Management, Business, And Accounting*, 1–15. <https://doi.org/10.37478/als.v14i01.3192>
- Febrianti, D. A., & Sari, R. P. (2023). Pengaruh Efektivitas Sosialisasi Perpajakan dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 14(4).
- Firmansyah, H., Anjani, A. N., & Nurdianti, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 02(01).
- Istiqamah, N., Arif, M., & Maknun, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep. *Center of Economic Student Journal*, 5(2), 50–56.
- Kanaiya, I. P. C., & Mustanda, I. K. (2020). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(3), 1109–1128.
- Marya, M., & Handra, H. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(2), 409–418. <https://doi.org/10.37481/sjr.v7i2.837>
- Maula, K. A., Alfiah, K. N., Mubarakah, I., Adawiyah, W. R., & Setyorini, C. T. (2023). Factors Affecting Capital Expenditure In Districts in West Java Province. *Accounting Analysis Journal*, 12(2), 134–143. <https://doi.org/10.15294/aaj.v12i2.69149>
- Mihadi Putra, Y., & Ahmad, Z. (2024). The Impact of Local Revenue, Regional Balance, Expenditure, and Financing on Economic Growth. *Social & Economic Bulletin (SEBI)*, 1(1), 59–77. <http://dx.doi.org/10.22441/sebi.2022.v15i1.001>
- Noeng, A. Y., & Ardini, L. (2023). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7, 2905–2916.
- Nopia Yudiastuti, L., Sujana, E., & Kadek Sinarwati, N. (2025). Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1), 51–69. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1.1570>
- Novia, N. I. S. S. (2023). Influence of Regional Original Income on Economic

- Growth in the Province of North Sumatera. *Outline Journal of Economic Studies*, 2(1), 17–23. <https://doi.org/10.61730/ojes.v2i1.31>
- Pambudi, A. S., Deni, Hidayati, S., Putri, D. A. C., & Wibowo, A. D. C. (2021). Special Allocation Fund (DAK) For Education Sector : A Development Evaluation Perspective Of Fiscal YEAR 2019. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 29(1), 41–58. <https://doi.org/10.14203/jep.29.1.2021.41-58>
- Perekonomian, T., Bali, P., Cahyaning, A., Pradana, T., & Mun, A. (2022). *Machine Translated by Google Pengaruh Pendapatan Daerah dan Dana Perimbangan*. 14, 439–451.
- Perkasa, L. S. P., Kawung, G. M. V., & Tumangkeng, S. Y. L. (2021). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 503–514.
- Pinem, I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Provinsi Sumatra Barat Periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 03.
- Pradana, A. C. T., & Mun'im, A. (2022). The Effect of Local Revenue and Balancing Funds on the Economy of Bali Province in 2012-2019. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 439–451. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.439-451>
- Prismadani, G. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, SILPA, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016. *Skripsi*.
- Puspita, D., Pahlevi, M., & Raharja, Y. M. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>
- Rahman, Z. (2021). Regional Original Income and Special Allocation Funds on Economic Development. *Advances in Economics & Financial Studies*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.60079/aefs.v1i1.14>
- Rumere, V., & Suruan, T. M. (2021). Konsekuensi Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Papua Barat. *Lensa Ekonomi*, 15, 279–298.
- Rustiana Marheni, & Eko Triyanto. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(11), 4223–4240. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i11.6130>
- Sisilia, M., & Harsono. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 57–70.
- Solikah, T., Riyanto, W. H., & Sari, N. P. (2024). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal melalui Pertumbuhan

- Ekonomi sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Financial Economics & Investment*, 4(2), 71–82.
- Sucipto, S. E. (2022). Pengaruh PAD , DAK Dan DBH Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung di Kabupaten Merangin. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 6(1), 131–144.
- Trianto, L., & Panggabean, M. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 21–33.
- Vianney, L. S. (2024). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jayawijaya. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(4).
- Wau, M., & Mendrofa, K. J. (2022). Efektivitas Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatra Barat. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 7(2), 163–166.
- Widyasari, K. (2022). The Effect Of PAD, Capital Expenditure, SILPA And Budget Changes On Regional Economic Growth During The Pandemic In Central Java. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)*, 5, 317–326. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i2.619>